

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DAN TANGGUNG
JAWAB PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN
BERDASARKAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR
(*POLLUTER PAY'S PRINCIPLE*) STUDI DI KABUPATEN
KUNINGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

Riffa Ramadvan Halim

NIM : 20211410091



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riffa Ramadyan Halim
NPM : 20211410091
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Efektivitas Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pay's Principle) Studi di Kabupaten Kuningan** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 3 Oktober 2025
Pembuat Pernyataan,



Riffa Ramadyan Halim

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DAN TANGGUNG
JAWAB PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN
BERDASARKAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR
(*POLLUTER PAY'S PRINCIPLE*) STUDI DI KABUPATEN
KUNINGAN**

Disusun Oleh :

Riffa Ramadyan Halim

Telah disetujui dan dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 3 Oktober 2025

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn
NIK. 410108890167

Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H., M.H
NIK. 41010879147



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H
NIK. 410109850243

ABSTRAK

Efektivitas Penegakan Hukum Dan Tanggung Jawab Pelaku Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pay's Principle*) Studi Di Kabupaten Kuningan Oleh Riffa Ramadyan Halim NIM 20211410091 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan 2025

Pencemaran lingkungan akibat limbah industri menjadi persoalan serius di tengah perkembangan ekonomi. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai alat penyelesaian setiap pelanggaran, termasuk pencemaran. **Rumusan Masalahnya** yaitu bagaimana pengaturan pertanggung jawaban pelaku pencemaran lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bagaimana efektivitas penegakan hukum dan pertanggung jawaban bagi pelaku pencemaran lingkungan di Kabupaten Kuningan. **Tujuan Penelitian** untuk mengetahui bagaimana pengaturan tanggung jawab pelaku pencemaran lingkungan dan bagaimana efektivitas penegakan hukum dan pertanggung jawaban pelaku pencemaran lingkungan di kabupaten kuningan dan mengetahui penegakan hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan di Kabupaten Kuningan. **Metode Penelitian** yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta studi dokumen yang meliputi data primer, sekunder, dan tersier. **Hasil Penelitian** ini mengenai pengaturan Tanggung Jawab Pelaku Pencemaran Lingkungan diatur dalam Pasal 28 H ayat 1 Undang- Undang dasar 1945 dan pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penegakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan telah berusaha untuk menerapkan prinsip *Polluter Pays* melalui pengenaan ganti rugi dan kewajiban pemulihan lingkungan bagi pelaku pencemaran. Namun, efektivitas implementasinya masih terkendala, salah satunya karena terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menghambat optimalisasi pengawasan dan penindakan pelanggaran. **Simpulan** Pertanggungjawaban pelaku pencemaran telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Kuningan belum optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia, fasilitas, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya efek jera, belum konkret diterapkannya prinsip *Polluter Pays*, serta minimnya partisipasi masyarakat. **Saran** dalam penulisan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan perlu memperkuat kebijakan lingkungan melalui alokasi anggaran khusus dan evaluasi berkala terhadap Perda No. 7 Tahun 2014, serta meningkatkan sinergi antarinstansi dalam pengawasan dan penindakan pencemaran kemudian Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan kapasitas SDM, mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi, serta memperkuat transparansi data agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan lingkungan.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Prinsip Pencemar Membayar

ABSTRACT

***The Effectiveness of Law Enforcement and the Responsibility of Environmental Polluters Based On the Polluter Pays Principle: A Study in Kuningan Regency
By Riffa Ramadyan Halim Student ID: 20211410091 Law Science Study
Program, Faculty of Law, Kuningan University, Kuningan 2025***

Environmental pollution caused by industrial waste has become a serious issue amid economic development. As a state governed by law, Indonesia places the law as an instrument for resolving every violation, including pollution. The research problems addressed in this study are how the responsibility of environmental polluters is regulated under Indonesian legislation, and how effective law enforcement and accountability for polluters are in Kuningan Regency. The objectives of the research are to determine the regulation of polluters' responsibility, to analyze the effectiveness of law enforcement and accountability of polluters in Kuningan Regency, and to examine the enforcement measures against environmental polluters in the region. The research method used is an empirical juridical approach, with data collection techniques through observation, interviews, and document studies involving primary, secondary, and tertiary data. The findings reveal that the regulation of polluters' responsibility is stipulated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 59 paragraph (4) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Environmental law enforcement conducted by the Environmental Agency of Kuningan Regency has sought to apply the Polluter Pays Principle through the imposition of compensation and obligations for environmental restoration on polluters. However, the effectiveness of its implementation is still constrained, particularly due to the limited number of Civil Servant Investigators (PPNS), which hampers the optimization of monitoring and law enforcement. The conclusion shows that the responsibility of polluters is regulated under Law Number 32 of 2009, but environmental law enforcement in Kuningan Regency has not yet been optimal. The main obstacles include limited human resources, inadequate facilities, low legal awareness, weak deterrent effects, the lack of concrete application of the Polluter Pays Principle, and minimal public participation. The recommendations of this study suggest that the Kuningan Regency Government should strengthen environmental policies through the allocation of special budgets and periodic evaluations of Regional Regulation Number 7 of 2014, as well as enhance inter-agency synergy in monitoring and enforcement. Furthermore, the Environmental Agency needs to improve human resource capacity, develop technology-based monitoring systems, and strengthen data transparency so that the public can actively participate in environmental supervision.

Keywords: *Effectiveness, Law Enforcement, Polluter Pays Principle.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penegakan Hukum Dan Tanggung Jawab Pelaku Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pay’s Principle*) Studi Di Kabupaten Kuningan”**. Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof . Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing I yang bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
7. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

10. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog selaku Dosen Pembimbing II yang tidak lupa selalu memberikan arahan dan masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik;
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan khususnya bidang Pengendalian, Pemulihan dan Penegakan Hukum Lingkungan yang turut membantu proses penyelesaian penelitian ini;

Kuningan, Mei 2025

Riffa Ramadyan Halim
NIM. 20211410091

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	7
1. Landasan Teori	7
2. Landasan Konseptual	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penegakan Hukum dan Prinsip Pencemar Membayar	17
1. Penegakan Hukum	17
2. Penegakan Hukum dalam Konteks Lingkungan Hidup	30
3. Prinsip Pencemar Membayar	33
B. Tanggung Jawab Hukum.....	38
C. Tanggung Jawab Hukum dalam Konteks Lingkungan Hidup	42
D. Efektivitas Hukum	46
E. Efektivitas Hukum dalam Konteks Lingkungan Hidup.....	47

BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Spesifikasi Penelitian	53
B. Metode Pendekatan	54
C. Tahap Penelitian	54
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Alat Pengumpul Data	55
F. Analisis Data	56
G. Lokasi Penelitian.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Pengaturan Pertanggung Jawaban Pelaku Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	57
Analisis dengan Teori Negara Hukum Satjipto Rahardjo	62
Analisis dengan Teori Lawrence M. Friedman	63
B. Efektivitas Penegakan Hukum dan Pertanggung Jawaban Pelaku Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Kuningan.....	64
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Data Jenis aduan pencemaran lingkungan di dinas lingkungan hidup kabupaten kuningan.....	66
Tabel	Aspek Hukum dan implementasi	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Surat Keterangan Penelitian	79
Lampiran	Surat Keterangan Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80
Lampiran	Surat Balasan izin Penelitian dari Dinas Lingkungan Hidup	81
Lampiran	Wawancara dengan ibu fika selaku staff di bidang pengendalian, pemulihan, dan penegakan hukum lingkungan di Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan	82
Lampiran	Wawancara dengan ibu intan yuniawati kepala bidang perizinan usaha di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan	83